

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era modern ini interior semakin berkembang pesat sebagai penunjang fasilitas publik maupun penataan suatu ruang, salah satunya adalah gedung perkantoran. Kantor menjadi fasilitas yang penting dan selalu akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saat ini sudah banyak perkantoran yang memperhatikan bagaimana kondisi interiornya, karena secara tidak langsung interior kantor sangat berpengaruh pada aktivitas dan kinerja pegawai atau orang-orang yang berkepentingan di kantor tersebut.

Sudah banyak ditemukan baik kantor umum ataupun kantor pemerintahan, seperti salah satu contoh kantor pemerintahan yaitu kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi / kabupaten / kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Menurut Sukarna (1990:61-62) yang memberikan pengertian bahwa “badan perwakilan politik atau badan konstitusional yang di tugasi untuk menjalankan *political control, legal control, social control, economic control, education control*”. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang sangat berat. Bila melihat dari pengertian di atas berarti DPRD adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) untuk menjadi wakil mereka yang bisa mengaspirasikan keinginan masyarakat untuk hidup yang lebih baik lagi.

Pada perancangan ini akan dilakukan perancangan kantor DPRD Kota Cirebon yang berada di Jalan Siliwangi No. 109, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat yang dimana DPRD Kota Cirebon pada tahun 2020 merencanakan menambah bangunan baru yang sudah terancang untuk memenuhi fasilitas kantor tersebut namun secara interior belum terdesain secara detail hal tersebut merupakan aspirasi dari pimpinan sementara DPRD Kota Cirebon yang mewakili aspirasi dari para legislator periode 2014-

2019, dimana kurangnya fasilitas penunjang kinerja dewan. Ditinjau dari permasalahan tersebut, bahwa kurangnya fasilitas ruang kerja seperti ruang fraksi partai dan permasalahan interior yang kurang sehingga pelaksanaan rapat fraksi dilakukan di ruang komisi. Selain kurangnya ruang kegiatan, berdasarkan tinjauan langsung pada kantor tersebut bahwa kurangnya penerapan lokalitas kota Cirebon pada interior kantor sehingga dari segi estetika sangat kurang dan juga tidak mencirikan sesuatu yang khas dari kota Cirebon.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa kantor DPRD Kota Cirebon membutuhkan pengembangan ruang kerja untuk fraksi partai agar dapat mengoptimalkan kinerja dan memenuhi fasilitas pendukung lainnya dari segi interior ataupun media penunjang berjalannya aktivitas pada kantor DPRD Kota Cirebon sebagai kenyamanan dalam melaksanakan tugas. Pada perancangan kantor DPRD Kota Cirebon menggunakan pendekatan pada budaya kota Cirebon dengan konsep yang modern sehingga menciptakan suasana yang tidak kaku. Untuk itu permasalahan tersebut menjadi pertimbangan dalam mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan.

## **1.2. Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perancangan gedung DPRD Kota Cirebon terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

- a. Fasilitas ruangan yang kurang memadai sehingga kegiatan anggota dewan tidak memiliki ruang privasi
- b. Organisasi ruang yang belum stabil sehingga penempatan ruangan pegawai belum sesuai
- c. Penerapan lokalitas kota Cirebon yang tidak diterapkan sehingga interior menjadi monoton dan tidak estetis.

## **1.3. Rumusan Permasalahan**

Dari uraian permasalahan di atas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut :

- a. Fasilitas apa saja yang perlu di tingkatkan dalam perancangan kantor DPRD Kota Cirebon?
- b. Bagaimana merancang interior yang dapat mengorganisasikan ruang sehingga dapat memenuhi fasilitas dan kapasitas yang belum sesuai dengan aktivitas pengguna?

- c. Bagaimana cara menerapkan lokalitas kota Cirebon pada interior kantor agar memberikan kesan yang tidak monoton?

#### **1.4. Tujuan Perancangan**

Tujuan pada perancangan interior kantor DPRD Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pada kantor DPRD Kota Cirebon khususnya anggota dewan.
- b. Mengorganisasikan dan mengefektifkan kembali ruang berdasarkan tingkatan jabatan dan peran, dan publik hingga privat.
- c. Menerapkan konsep desain interior dari segi psikologi yang dapat meningkatkan kualitas kinerja agar dapat berjalannya roda pemerintahan dengan maksimal.

#### **1.5. Batasan Perancangan**

Batasan perancangan pada kantor DPRD Kota Cirebon di batasi pada perancangan area ruang rapat paripurna, ruang ketua dan wakil ketua DPRD, ruang anggota, ruang AKD, lounge dan beserta fasilitas pendukungnya.

#### **1.6. Manfaat Perancangan**

Manfaat perancangan kantor DPRD Kota Cirebon sebagai berikut :

##### **1. 6.1. Bagi Penulis atau Desainer**

- a. Dapat turut berpartisipasi atas pemecahan masalah pada desain dan mendapatkan wawasan untuk pengetahuan yang lebih jauh tentang perancangan interior ruang public khususnya kantor.
- b. Sebagai sumber referensi untuk profesi yang turut berperan dalam perkembangan desain dan sektor perkantoran.

##### **1. 6.2. Bagi Perusahaan**

- a. Dapat meningkatkan efektifitas bekerja dan produktifitas sebuah kantor pemerintahan sehingga mendapatkan output yang optimal.
- b. Meningkatkan kualitas kinerja kantor pemerintahan.

- c. Dapat menjadi preseden baik yang dapat diteladani dalam kasus perencanaan kantor pemerintahan di Indonesia.

## **1.7. Metode Perancangan**

Dalam penulisan laporan hasil perancangan interior kantor DPRD ini, dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, sebagai berikut :

### **1. 7.1. Tahap Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan data yang berhubungan dengan objek perancangan dan masalah pada objek perancangan. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk perancangan interior kantor DPRD Kota Cirebon ini dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Melakukan survey ke kantor DPRD Kota Cirebon, kantor DPRD Bandung dan kantor DPRD Jawa Barat. Setelah itu mendata kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing dari objek, setelah melalui proses survey dan analisa dari ketiga objek maka dipilih kantor DPRD Jawa Barat sebagai acuan perancangan karena mendekati standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah.

#### **b. Wawancara**

Melakukan tahap wawancara kepada pihak kantor DPRD Kota Cirebon yang kemudian hasil wawancara dengan narasumber dirangkum dalam bentuk tulisan.

#### **c. Studi Literatur**

Melalui studi literatur dari buku-buku seperti buku tentang kantor DPRD dan buku human dimension kemudian dari website kantor DPRD, jurnal, E-book dan yang berhubungan dengan perancangan kantor DPRD baik standar, teknis maupun efek yang akan ditimbulkan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

### **1. 7.2. Tahapan Analisa Data**

Menganalisa seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi kepustakaan, dan survey lapangan untuk dicari keterkaitan antara satu dengan yang lain yang kemudian dikaitkan dengan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan pada objek untuk mengatasi masalah desain tersebut.

### 1. 7.3. Programming / Sintesa

Membuat analisa lanjutan sesuai tahapan perancangan untuk menjadi acuan desain berupa organisasi ruang dan kebutuhan ruang pada kantor DPRD dan menganalisa hubungan antar ruang terkait fungsi setiap area yang berdekatan.

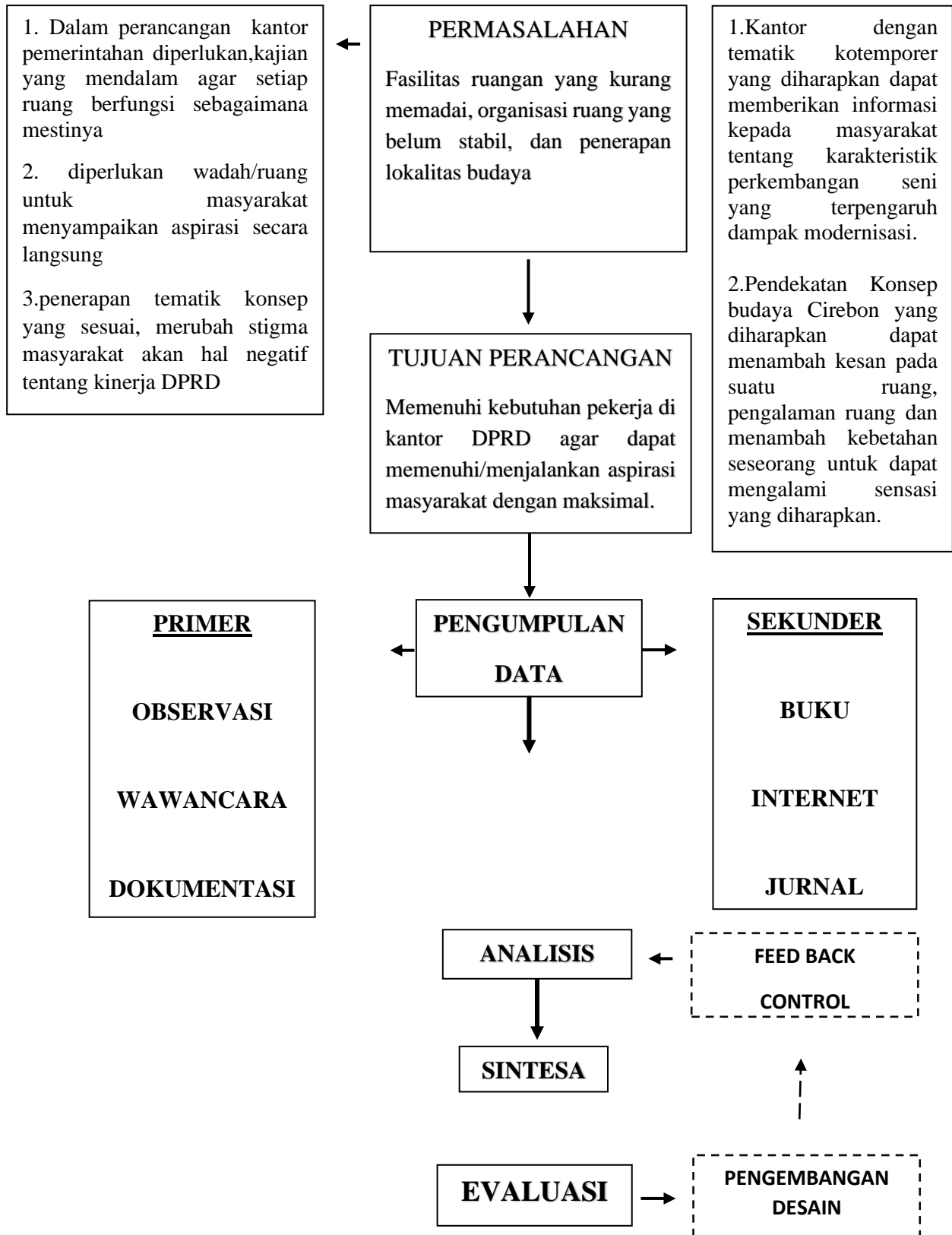
### 1. 7.4. Menentukan Tema dan Konsep Perancangan

Berdasarkan pada hasil analisa data yang di lakukan, dapat membantu dalam penentuan tema dan konsep perancangan yang tepat, yang dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan yang ada.

### 1. 7.5. Pengembangan Desain

Melakukan proses desain dari seluruh data yang diperoleh dengan menerapkan tema dan konsep yang telah dibuat hingga diperoleh desain final berupa sketsa, gambar teknik, 3D dan maket yang merupakan hasil akhir dari tujuan perancangan interior kantor DPRD Kota Cirebon.

## 1.8. Kerangka Berpikir



## **1.9. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan dibutuhkan gambaran sistematika penulisan antara lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis telah menggambarkan serta menjelaskan secara garis besar perihal desain interior yang akan dilakukan dan menjelaskan dari latar belakang masalah dari kantor DPRD yang pada akhirnya mengambil permasalahan yang ada di kantor ini.

### **BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN**

Pada bab ini, mengulas kegiatan atau juga menjelaskan tentang kajian literatur yang berisikan tentang teori – teori yang di gunakan sebagai landasan perancangan yang terdiri dari deskripsi objek perancangan, program kebutuhan ruang dari perancangan.

### **BAB III : KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR**

Pada bab ini, membahas tentang semua hasil pengamatan dan berisi tentang konsep perancangan kantor DPRD Kota Cirebon yaitu, tema umum, sasaran desain, organisasi ruang layout, zoning dan blocking. Kemudian konsep visual yang di bentuk, material, warna, dan persyaratan umum pada kantor DPRD tersebut.

### **BAB IV : KONSEP PERANCANGAN DAN DENAG KHUSUS**

Pada bab ini, membahas tentang konsep perancangan pada denah khusus yang telah di tetapkan yaitu mulai dari tema, sasaran desain, program ruang, denah, zoning dan blocking kemudian sistem penghawaan, sistem pencahayaan , sistem keamanan.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab penutup ini, peneliti memberikan kesimpulan akhir di angkat meliputi hal hal apa yang menjadi masalah dalam sebuah perancangan ini dan kemudian solusi solusi apa saja yang di tawarkan penulis pada perancangan.